

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peserta didik merupakan individu yang sangat unik. Sebagai individu yang unik, peserta didik memiliki bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Aunurrahman berpendapat (2009, hlm. 33) bahwa “setiap orang berbeda satu antara satu dengan yang lain dan tidak satupun yang memiliki ciri-ciri yang sama”. Setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu yang lainnya. Perbedaan individual ini merupakan kodrat manusia yang bersifat alami. Hirsch (1999, hlm. 12) menyatakan bahwa *individual differences are mainly differences in academic preparation and ability, and the accommodation of these differences take the form of ability tracking*. Yang berarti bahwa perbedaan individu pada umumnya mempengaruhi perbedaan dalam hal akademik. Sehingga pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua karakter dan gaya belajar yang unik dari setiap siswa. Bloom juga berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yakni *individual differences in learning that is an observable phenomenon which can be predicted, explained, and altered in a great variety of ways* (1976, hlm. 34).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara”. Pasal tersebut secara tegas menekankan kepentingan peserta didik sebagai bagian penting dari komponen pendidikan. Dengan demikian pendidikan merupakan sebuah cara supaya

SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia dapat berkarya, berdaya, dan berkontribusi dengan baik sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya masih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 pada butir (f) dinyatakan “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Hak peserta didik haruslah dikedepankan dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Terlebih saat ini di sekolah-sekolah sudah di terapkan Sekolah Inklusi dan Ramah Anak. Namun, pada kenyataannya sekolah-sekolah masih menyamaratakan potensi dan cara belajar setiap siswa. Hal tersebut tergambar dari masih diberlakukannya sistem paket di setiap sekolah, yang berarti sekolah masih menganggap semua peserta didik mempunyai potensi yang sama. Selama ini pola pembelajaran sistem paket cenderung membatasi keragaman minat dan potensi peserta didik serta paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitikberatkan peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Sistem ini mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam proses penuntasan materi ajarnya. Sistem ini menjadi kurang efektif ketika dihadapkan pada realitas peserta didik yang majemuk baik dari sisi *intelligence quotient* (IQ) maupun minat dan bakatnya yang akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses penyelesaian materi ajar. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Muhlis (dalam Qosim, 2017, hlm. 140-141) Kemajemukan peserta didik ini harus direspon dengan baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 poin:

(b):2 “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Selanjutnya pada poin (f):3 “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Berdasar pada Undang-undang di atas, maka tidak akan terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa mengikuti pola belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih. Karena peserta didik yang mempunyai potensi lebih atau intelektualitas lebih tinggi akan merasa terhambat oleh peserta didik yang pemahamannya kurang. Begitupun sebaliknya, peserta didik yang mempunyai pemahaman yang kurang akan merasa kewalahan menerima pembelajaran yang sama dengan peserta didik yang lain. Masalah lain yang ditimbulkan akibat sistem paket adalah siswa dapat mengalami tinggal kelas yang berakibat siswa menjadi frustrasi, tidak percaya diri dan bahkan banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan penyamarataan standar ketuntasan belajar, padahal hasil belajar setiap daerah pasti akan berbeda. Belum lagi persaingan global yang memungkinkan hanya mereka yang mampu akan berhasil.

Block (1971, hlm. 8) mengemukakan bahwa hasil dari sekitar 40 penelitian utama menunjukkan bahwa secara umum 75% siswa yang belajar menggunakan pendekatan belajar tuntas telah mencapai standar prestasi yang sama tingginya seperti 25% prestasi tertinggi yang belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berkelompok konvensional. Dalam sebuah penelitian di mana strateginya telah diperhalus dan direplikasi, 90% siswa belajar tuntas telah mencapai prestasi yang sama baiknya dengan 20% siswa berprestasi tertinggi yang menggunakan pendekatan non-belajar tuntas. Siswa belajar tuntas juga menunjukkan minat yang lebih besar dan sikap yang lebih baik terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya dibanding dengan siswa non-belajar tuntas. (Block, 1971, hlm. 9). Para pemangku kebijakan di Indonesia pada akhirnya mengupayakan pendidikan yang dapat memfasilitasi setiap keunikan peserta didik dalam hal ketuntasan belajar tersebut. Pemerintah kemudian merintis SMA/MA/SMLB, SMK/MAK dengan Satuan Kredit Semester (SKS). Hardini (2016, hlm. 247)

Adapun dasar lain dari program SKS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau

bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.” selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan “Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.”

Dirjen Pembinaan SMA (2017, hlm. 1) “Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya”. Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya”. Untuk itu harus ada diversifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran, diversifikasi tersebut dibagi menjadi kelompok *low*, *middle*, dan *high*.

Pasal 2 pada Permendikbud (dalam Dirjen Pembinaan SMA, 2017, hlm. 2) menjelaskan bahwa SKS diselenggarakan dengan prinsip:

(a) fleksibel; dalam arti penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri; (b) keunggulan; dalam arti penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar; (c) maju berkelanjutan yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain; dan (d) keadilan, yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa SKS merupakan sistem layanan pendidikan yang mengedepankan layanan utuh pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki

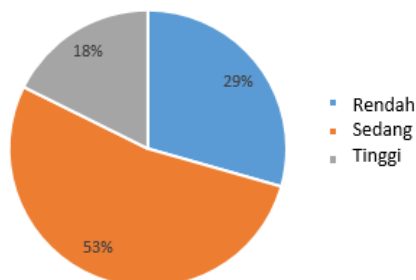
bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar yang unik. Sehingga jika ingin sukses dan berhasil dalam sistem pembelajaran ini maka peserta didik sendirilah yang harus mempunyai strategi belajar, kemampuan, dan ketekunan bukan ditentukan oleh guru ataupun sistem paket.

Sistem Kredit Semester (SKS) ini diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran variatif dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran variatif dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Sedangkan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Model pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) ini dapat pula dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya yang mempunyai kecerdasan istimewa. Hingga Tahun 2016 jumlah sekolah penyelenggara SKS yang telah terdata oleh Direktorat pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebanyak lebih dari 100 sekolah baik negeri maupun swasta (Dirjen Pembinaan SMA, 2017, hlm. 2).

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan ditemukan bahwa nilai hasil UN siswa yang sedang melaksanakan SKS di SMAN 4 Bandung begitu majemuk, yang ternyata sekolah menilai bahwa kemajuan tersebut harus dapat sekolah fasilitasi dengan diimplementasikannya Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung, dan juga terhitung sejak tahun 2018 SMAN 4 Bandung menjadi sekolah inklusi dan ramah anak. Sehingga semakin meyakinkan Kepala Sekolah dan jajaran wakasek untuk dapat menerapkan kurikulum ataupun sistem yang dapat memfasilitasi setiap siswanya dengan baik.

### **Tabel 1.1 Sebaran Nilai UN kelas XI SKS Kurikulum 2013**

Sebaran Nilai UN kelas XI SKS Kurikulum 2013



Sumber: Data Penelitian

Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Agustina Tyas Asri Hardini (2016) dengan judul evaluasi program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Salatiga. Hasil dari penelitian tersebut 1) Penyelenggaraan program sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Salatiga dari segi konteks, berdasarkan atas kebutuhan yang ada pada sekolah yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dengan kategori cerdas istimewa (CI) agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. 2) Penyelenggaraan program sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Salatiga dari segi masukan (input), meliputi rencana pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, guru, peserta didik, pembiayaan, sarana prasarana dan jadwal cukup memadai. 3) Penyelenggaraan program sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Salatiga dari segi proses telah dilaksanakan sesuai perencanaan program, walaupun program SKS yang berjalan masih semi paket karena kepentingan pemenuhan jam mengajar guru, dan keterbatasan ruang. 4) Penyelenggaraan program sistem kredit semester di SMA Negeri 1 Salatiga dari segi hasil sudah sesuai dengan tujuan awal program, sehingga saat ini sudah terdapat 2 kelas percepatan di SMA Negeri 1 Salatiga. Selain itu terdapat peningkatan hasil ujian nasional dari tahun ke tahun. 5) Pelaksanaan program SKS di SMA Negeri 1 Salatiga berdasarkan kriteria rekomendasi kebijakan meliputi efektivitas; efisiensi; kecukupan; pemerataan, responsivitas dan kelayakan; program SKS yang dilaksanakan di SMAN 1 Salatiga telah memenuhi keenam kriteria tersebut, sehingga pelaksanaan

program tetap dapat dilanjutkan namun dengan beberapa revisi program yang berkaitan dengan masukan (Input) bagi program.

Penelitian lain yang relevan juga pernah dilakukan oleh Indra Moesthafa (2018) dengan judul penelitian Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo. Hasil penelitian tersebut 1) Perencanaan kurikulum Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Probolinggo yakni: (a) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan dasar hukum Sistem Kredit Semester, berbagai macam media, sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah (b) Menyiapkan rencana pemetaan struktur mata pelajaran dan atau kompetensi dasar di setiap semesternya (c) Menentukan alokasi waktu (d) Menentukan tujuan pembelajaran dan pengidentifikasian materi pembelajaran untuk siswa (e) Mendesain kegiatan pembelajaran (f) Menentukan strategi dan jenis penilaian yang akan digunakan (g) Membantu siswa menyusun Kartu Rencan Studi. 2) Pelaksanaan Kurikulum Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Probolinggo, yakni: (a) Kepala Sekolah mengembangkan kurikulum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana (b) Kepala Sekolah memberi arahan tentang pelaksanaan kurikulum (c) Kepala Sekolah memberikan solusi kepada guru jika terdapat kesulitan dalam praktek pembelajaran (d) Guru melaksanakan pembelajaran. 3) Evaluasi kurikulum Sistem Kredit Semester yang dilakukan di SMA Negeri 4 Bandung yaitu melalui rapat bersama wakil kepala bidang kurikulum, monitoring, supervisi, laporan evaluasi.

Penelitian lain yang relevan juga pernah dilakukan oleh Achmad Muhlis (2017) dengan judul pengembangan pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester di MTS Negeri Sumber Bungur Pamekasan. Hasil penelitian tersebut adalah pengembangan pembelajaran dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan upaya inovatif yang dilakukan oleh MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajarannya.

Penelitian lain yang relevan juga pernah dilakukan oleh Mukhammad Ilman Nafia (2017) dengan judul Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus.

Hasil penelitian tersebut adalah Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari seluruh komponen yang ada saling mendukung. SMAN 1 Kudus memiliki dua struktur kurikulum dan memodifikasi RPP untuk kelas 4 semester dan 6 semester. Proses pembelajaran menekankan pada teroptimalnya potensi peserta didik dalam mempercepat proses belajar. Sedangkan proses pembelajaran mengacu tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) kendala yang timbul dalam penerapan SKS di SMAN 1 Kudus disebabkan oleh belum terjadi sinkronisasi antara PSMA dan PT (Perguruan Tinggi). Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah telah melakukan koordinasi dengan PSMA dan melakukan pertemuan antar rektor serta membentuk tim PDSS dalam mengakomodasikan keperluan peserta didik.

Penelitian-penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian serupa mengenai Sistem Kredit Semester (SKS) di Sekolah Menengah Atas (SMA), selanjutnya peneliti melakukan penelitian pendahuluan di SMA Negeri 4 Bandung, ternyata sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Sistem Kredit Semester (SKS) selama dua tahun, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disana karena peneliti menemukan banyak temuan-temuan mengenai Sistem Kredit Semester (SKS). Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “s”.

## **1.2 Batasan Masalah**

1.2.1 Permasalahan dibatasi pada Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung.

1.2.2 Implementasi kurikulum meliputi: perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum tersebut.



### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan satu diantara tahapan dari beberapa tahapan penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka di rumuskanlah rumusan masalah secara umum yaitu “Bagaimana Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) Pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Kota Bandung”, pendalaman terhadap rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk penelitian berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pemahaman Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan Guru mengenai Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung?
- 1.3.2 Bagaimana perencanaan pembelajaran dalam Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung?
- 1.3.3 Bagaimana penilaian dalam Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung?
- 1.3.4 Kendala apa yang ditemui dalam mengimplementasikan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di atas. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) Pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Kota Bandung. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan khusus, yaitu untuk:

- 1.4.1 Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan Guru mengenai Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung.

- 1.4.2 Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perencanaan pembelajaran dalam Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung.
- 1.4.3 Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penilaian hasil belajar oleh guru dalam Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung.
- 1.4.4 Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) pada Kurikulum 2013 di SMAN 4 Bandung, yang diharapkan dapat menemukan solusi atau perbaikannya atas kendala yang ditemukan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakan, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi panduan atau pedoman bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan Sistem Kredit Semester di Sekolah Menengah Atas.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta wawasan kepada peneliti mengenai bagaimana SMAN 4 Bandung mengimplementasikan Sistem Kredit Semester.

- a) Sebagai masukan untuk pemangku kebijakan pendidikan, perancang kurikulum baik dinas maupun sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam menetapkan, mengembangkan dan mengimplemmentasikan Sistem Kredit Semester (SKS) di suatu daerah.
- b) Sebagai referensi dan bahan penelitian lanjutan yang relevan dalam bidang pengembangan Sistem Kredit Semester (SKS).

- c) Sebagai sumbangsih penulis yang merupakan salah satu guru di SMAN 4 Bandung dalam bentuk pemikiran, khususnya pada pengembangan kurikulum.

### **1.6 Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi dari penulisan tesis beriku adalah:

BAB I mengkaji mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis

BAB II mengkaji mengenai Hakikat kurikulum, Hakikat SKS (Sistem Kredit Semester), serta Kerangka pemikiran penelitian.

BAB III mengkaji mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV mengkaji mengenai subyek penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan temuan

BAB V membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi.